

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi

MUHAMAD NUR FAUZAN

NPM : C10160076



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung)

MUHAMAD NUR FAUZAN

NPM : C10160076

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing

Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Prof. Dr.rer.nat M. Fani Cahyandito, CSP

Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 10 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

(Muhamad Nur Fauzan)

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung)**

Oleh :
Muhamad Nur Fauzan

Pembimbing :
Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran serta pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Sedangkan hipotesis diuji menggunakan uji t dan uji F dengan nilai signifikansi 5%.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun secara simultan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**THE EFFECT OF PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
ACCESSIBILITY OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS TO
ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT**

(Study On Bandung Regency SKPD)

By:

Muhamad Nur Fauzan

Advisor:

Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the description and influence of the presentation of financial statements and the accessibility of regional financial reports to the accountability of regional financial management in the Regional Work Unit of Bandung Regency. The independent variables in this study are the presentation of financial statements and the accessibility of regional financial statements. While the dependent variable in this study is the accountability of regional financial management.

This study uses a descriptive verification analysis method with a survey approach. The data used are primary data obtained from the questionnaire by determining the sample using purposive sampling. The analysis used is multiple linear regression analysis. While the hypothesis was tested using the t test and F test with a significance value of 5%.

Based on data analysis conducted, it was concluded that partially the presentation of financial statements affected the accountability of regional financial management and the accessibility of regional financial statements affected the accountability of regional financial management. Simultaneously it is concluded that there is an influence of the presentation of financial statements and the accessibility of regional financial statements to the accountability of regional financial management.

Keywords : Presentation of financial statements, accessibility of regional financial statements, accountability of regional financial management.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini mengambil judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini bukan hanya atas usaha pribadi penulis, tetapi juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang memberikan dukungan moril dan materil dari awal hingga selesainya skripsi ini. Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada teman-teman di kampus yang telah memberikan dukungan serta informasi. Juga dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih ini juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Hery Syaerul Homan S.Pd., M.Pd., M.Ak sebagai pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Prof. Dr.rer.nat M. Fani Cahyandito, CSP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
3. Bapak Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
4. Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
5. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
6. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
7. Seluruh staf dan dosen pengajar STIE Ekuitas yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Seluruh staff BAK, BAKU, dan Perpustakaan STIE Ekuitas yang telah membantu pada bidang administrasi.
9. Seluruh Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Bandung.
10. Seluruh Kepala Badan di lingkungan Kabupaten Bandung.
11. Seluruh rekan–rekan jurusan S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
12. Semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terealisasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung, 10 Maret 2020

Penulis

Muhamad Nur Fauzan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK iv

***ABSTRACT* v**

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN..... xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 8

1.3.1 Maksud Penelitian..... 8

1.3.2 Tujuan Penelitian 9

1.4 Kegunaan Penelitian 10

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis 10

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis..... 11

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 11

1.5.1 Lokasi Penelitian.....	11
1.5.2 Waktu Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS PENELITIAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan	12
2.1.1.1 Peranan Laporan Keuangan	12
2.1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan	13
2.1.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	13
2.1.1.4 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	14
2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	15
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	15
2.1.3.2 Keuangan Daerah	16
2.1.3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.1.3.4 Prinsip Akuntabilitas.....	17
2.1.3.5 Dimensi Akuntabilitas.....	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	19
2.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	19

2.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2.2.3 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Objek Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	31
3.2.1 Metode Yang Digunakan	31
3.2.2 Operasional Variabel.....	32
3.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi Penelitian.....	35
3.3.2 Sampel	37
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1 Sumber Data.....	40
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	41
3.5.1.1 Uji Validitas	41
3.5.1.2 Uji Reliabilitas	42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	43

3.5.2.2	Uji Multikolineritas	44
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	45
3.5.4	Analisis Koefisien Determinasi	45
3.5.5	Pengujian Hipotesis.....	46
3.5.5.1	Uji Statistika t (Uji Parsial).....	46
3.5.5.2	Uji Statistika F (Uji Simultan)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	50
4.1.1	Hasil Uji Kualitas Data	50
4.1.1.1	Hasil Uji Validitas.....	50
4.1.1.2	Hasil Uji Reliabilitas	53
4.1.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.1.2.1	Hasil Uji Normalitas	55
4.1.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
4.1.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.1.3	Karakteristik Responden	58
4.1.3.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota	59
4.1.3.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	61
4.1.3.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
4.1.3.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63

4.1.3.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	64
4.2	Hasil Penelitian	66
4.2.1	Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ...	66
4.2.1.1	Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	66
4.2.1.2	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	68
4.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	70
4.2.3	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ...	73
4.2.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
4.2.3.2	Analisis Koefisien Determinasi	74
4.2.3.3	Pengujian Pengaruh Secara Parsial (Uji t)	75
4.2.3.4	Pengujian Pengaruh Secara Simultan (Uji F).....	77
4.3	Pembahasan.....	79
4.3.1	Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ...	79
4.3.1.1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	79

4.3.1.2	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	81
4.3.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	83
4.3.3	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ...	86
4.3.3.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	86
4.3.3.2	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	87
4.3.3.3	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Predikat SAKIP Kabupaten Bandung	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	23
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	27
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2	Populasi Penelitian.....	35
Tabel 3.3	Sampel Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan.....	51
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan.....	53
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	54
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	55

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser.....	58
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota	59
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	61
Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	64
Tabel 4.15 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Penyajian Laporan Keuangan	66
Tabel 4.16 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	69
Tabel 4.17 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	71
Tabel 4.18 Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
Tabel 4.19 Koefisien Determinasi.....	75
Tabel 4.20 Hasil Uji t.....	77
Tabel 4.21 Hasil Uji F.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian.....	22
Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Usia.....	61
Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2** Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3** Tabel Distribusi r
- Lampiran 4** Tabel Distribusi t
- Lampiran 5** Tabel Distribusi F
- Lampiran 6** Hasil Output SPSS
- Lampiran 7** Fotokopi Formulir Pengajuan Penelitian Judul Skripsi
- Lampiran 8** Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9** Fotokopi Surat Permohonan Penggantian Topik/Judul Skripsi
- Lampiran 10** Fotokopi Kartu Bimbingan
- Lampiran 11** Fotokopi Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 12** Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi menggantikan era Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia sedikit demi sedikit melakukan pembenahan pada beberapa aspek bernegara salah satunya adalah reformasi pengelolaan keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia dimulai dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memiliki tujuan utama diantaranya adalah transparan dan bertanggung jawab. Melalui peraturan ini pula Negara mengamanatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa adanya pergeseran fungsi *ordonancing* dari Badan atau Bagian Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SKPD sebagai entitas yang berkewajiban untuk membuat laporan keuangan, dan penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional.

Otonomi Daerah sebagai buah dari reformasi hari ini dapat dirasakan salah satunya adalah dengan adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi utama dari otonomi

daerah yaitu terciptanya pengelolaan sumber daya daerah yang efisien serta efektif, kualitas pelayanan yang lebih baik dan menyejahterahkan masyarakat, dan memberi ruang serta memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan (Mardiasmo, 2006). Sehingga penerapan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi daerah yang akan berdampak pada kemajuan daerah. Tuntutan atas pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel pada akhirnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi akuntansi keuangan daerah serta manajemen keuangan daerah (Hehanussa, 2015). Akibatnya, pemerintah daerah harus meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah diantaranya adalah dengan cara menyediakan semua informasi keuangan daerah kepada publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah diharuskan untuk mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan. Kompetensi tersebut akan berbanding lurus dengan keterbukaan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan yang diantaranya adalah masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pemberi amanat untuk mengelola daerah. Masyarakat akan memberikan penilaian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, terlebih apabila laporan keuangan daerah mudah diakses maka masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan daerah sehingga kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dapat diminimalisir. Selain itu informasi

keuangan yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti keputusan ekonomi.

Cita-cita agar Indonesia secara menyeluruh memiliki pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membuat rapor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah I yang isinya menjelaskan hanya ada dua pemerintah daerah yang meraih predikat A terkait akuntabilitas kinerja daerah. Daerah yang mendapatkan predikat A tersebut adalah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Sedangkan, hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 untuk Kabupaten Bandung mendapatkan predikat BB. (www.jabar.tribunnews.com/ diunduh pada 5 Oktober 2019).

Tabel 1.1

Predikat SAKIP Kabupaten Bandung

No.	Tahun	Predikat SAKIP
1	2015	CC
2	2016	CC
3	2017	B
4	2018	BB

Sumber : Data diolah (2019)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan predikat SAKIP yang diperoleh oleh Kabupaten Bandung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tetapi hal tersebut masih jauh dari predikat terbaik yang dapat diperoleh suatu

daerah yaitu predikat AA. Raihan predikat tahun 2018 yang hanya mendapatkan BB terjadi karena program kegiatan belum terencana, terukur, tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya serta mengarah pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditentukan. (www.jabar.tribunnews.com/ diunduh pada 5 Oktober 2019). Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa predikat SAKIP sebelum tahun 2018 berada pada predikat lebih rendah dari tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena belum baiknya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan belum sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (www.bandungkab.go.id/ diunduh pada 5 Oktober 2019). Uraian tersebut menjelaskan efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dapat berperan penting untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 ada tiga dari 24 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan agar ketiga daerah tersebut mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil langkah-langkah strategis mulai dari identifikasi masalah, penyelesaian masalah dari aspek regulasi dan administrasi, hingga menyusun rencana aksi pencegahan korupsi (www.pikiran-rakyat/ diunduh pada 5 Oktober 2019).

Tidak hanya mendapat predikat BB dalam penilaian kinerja akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Bandung juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan beberapa

masukan terkait akuntabilitas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Masukan tersebut antara lain adalah pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan di modal dengan asset serta adanya *error* dari subsistem pemborong (www.ayobandung.com/ diunduh pada 5 Oktober 2019).

Pelaporan informasi keuangan daerah tidak hanya kepada lembaga yang berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban amanat rakyat. Akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami akan berbanding lurus dengan akuntabilitas yang efektif (Nurlaili, 2016). Namun, publikasi laporan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat masih kurang mendapat prioritas dari pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak lengkapnya laporan keuangan tahun 2018 pada laman resmi Kabupaten Bandung yaitu www.bandungkab.go.id yang diakses pada 5 Oktober 2019 sehingga masyarakat menjadi sulit untuk melakukan pemantauan atas keuangan daerah selama tahun tersebut.

Akuntabilitas publik merupakan pemenuhan kewajiban pemegang amanat kepada pemberi amanat melalui pemberian pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan kegiatan pemerintahan (Mardiasmo, 2006). Penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk melaksanakan amanat dari rakyat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu masyarakat juga berhak untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan (Putri, 2017). Menurut Kurniawan dan Rahayu (2019) laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang dalam penyusunannya

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip tepat waktu merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Nurlaili (2016) yaitu penyajian laporan keuangan. Salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Transparansi dan Akuntabilitas akan terwujud apabila laporan keuangan memuat informasi yang utuh (Masyhur, 2017). Kinerja finansial pemerintah daerah dapat diukur dengan laporan keuangan yang selanjutnya akan menciptakan akuntabilitas sektor publik (Superdi, 2017). Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Nurlaili (2016) faktor kedua yang memengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Kurniawan dan Rahayu, 2019). Menurut Somad (2016) tingkat akuntabilitas keuangan daerah dinilai salah satunya dengan tingkat pengungkapan serta kemudahan akses laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Penyebab dari ketidakmampuan laporan keuangan yang akuntabel bukan hanya disebabkan oleh tidak terdapatnya informasi relevan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang tidak tersedia dan tidak aksesibel bagi para pemangku kepentingan juga mengakibatkan penurunan pada kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Lily, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya untuk variabel penyajian laporan keuangan menurut Kurniawan dan Rahayu (2019), Asnawi, dkk (2019), Hehanussa (2015), Putri (2017), dan Fikrian (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, menurut penelitian Masyhur (2017), Nurlali (2016), Sari (2017), Lily (2015), dan Superdi (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta berdasarkan adanya teori dan bukti yang ditemukan pada penelitian terdahulu maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
2. Bagaimana gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

3. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
5. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

5. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
2. Untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
3. Untuk menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
4. Untuk menjelaskan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
5. Untuk menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama yaitu pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ajar bagi dosen serta tambahan ilmu bagi *civitas academica* STIE Ekuitas terutama mata kuliah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2019 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terjadi karena salah satu faktornya adalah peningkatan penyajian laporan keuangan (Hehanussa, 2015). Aktivitas pengelolaan sumber daya daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, dimana keterbukaan tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas (Masyhur, 2017)

Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip dan regulasi yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntansi berterima umum juga merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan karena merupakan salah satu faktor yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hehanussa, 2015).

2.1.1.1 Peranan Laporan Keuangan

Menurut Elsy, dkk (2016:48) laporan keuangan mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity). Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Elsy, dkk (2016:48) tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Rusmana, dkk (2017:37) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

1. Relevan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan maksud/kepentingan para penggunanya, Informasi dikatakan relevan apabila :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
 - c. Tepat waktu.
 - d. Penyajiannya selengkap mungkin.
2. Andal. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik :
 - a. Penyajian jujur.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
 - c. Netralitas
3. Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami. Sedapat mungkin penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna.

2.1.1.4 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan entitas yang membuat laporan keuangan. Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Erlina, 2015:23). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 14, komponen laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Fikrian (2017) aksesibilitas adalah hubungan yang tersedia dari satu tempat ke tempat lainnya. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat agar memperoleh serta mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah (Aliyah dan Nahar, 2012). Informasi laporan keuangan yang mudah diperoleh oleh pemangku kepentingan merupakan sebuah aksesibilitas laporan keuangan (Kurniawan dan Rahayu, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (...) merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat”.

Pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah membuka akses mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan, salah satunya adalah menerbitkan laporan keuangan pada laman resmi pemerintah.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kurniawan dan Rahayu (2019) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah pencapaian tujuan yang dilakukan oleh entitas pelaporan secara periodik atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan definisi akuntabilitas menurut Lukito (2014:2) adalah :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki definisi kewajiban mengungkapkan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik oleh pemerintah sebagai pihak yang mendapat amanat dari rakyat.

2.1.3.2 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah “semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Keuangan daerah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengungkapkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa:

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.1.3.4 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2010:43) prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.3.5 Dimensi Akuntabilitas

Mahmudi (2015:9) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit kerja kepada pemerintah daerah dan lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif.

2. Akuntabilitas horisontal

Pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan khususnya kepada masyarakat.

Lembaga pengelola dana dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawabannya tidak hanya pertanggungjawaban secara vertikal saja tetapi juga pertanggungjawaban secara horizontal. Media dapat menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban dalam jangka periode tertentu maupun sewaktu-waktu kepada publik maupun pihak internal karena pertanggung jawaban tersebut bukan hanya suka rela tetapi sudah menjadi suatu kebijakan hukum.

Menurut Mahmudi (2015:9) dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh lembaga pemerintah adalah:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga pemerintah untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berperilaku jujur dalam melaksanakan kewajiban.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas lembaga pemerintah agar mengelola lembaga pemerintah dengan efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban mengenai pertimbangan pencapaian tujuan dan pertimbangan alternatif program yang bisa menghasilkan output yang seoptimal mungkin dan biaya yang serendah mungkin.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah diambil oleh lembaga pemerintah.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga pemerintah dalam penggunaan uang publik secara ekonomi, efektif dan efisien, serta tidak terjadi korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi hal yang penting karena publik selalu mempunyai perhatian khusus untuk pengelolaan keuangan publik.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu cara mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang amanat rakyat untuk mengelola keuangan rakyat kepada para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sebagai pemberi amanat. Melalui laporan keuangan, para pemangku kepentingan dapat mengetahui aktivitas yang dilaksanakan oleh entitas pemerintahan, mengetahui uang publik yang dipergunakan, serta membandingkan antara uang publik yang dianggarkan dan dipergunakan.

Laporan keuangan yang diterima oleh masyarakat apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan akan membuat masyarakat menjadi semakin percaya kepada pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah merupakan bukti bahwa pemerintah daerah berhasil mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Hasil penelitian Kurniawan dan Rahayu (2019), Asnawi, dkk (2019), Hehanussa (2015), Putri (2017), Fikrian (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa faktor pertama yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan.

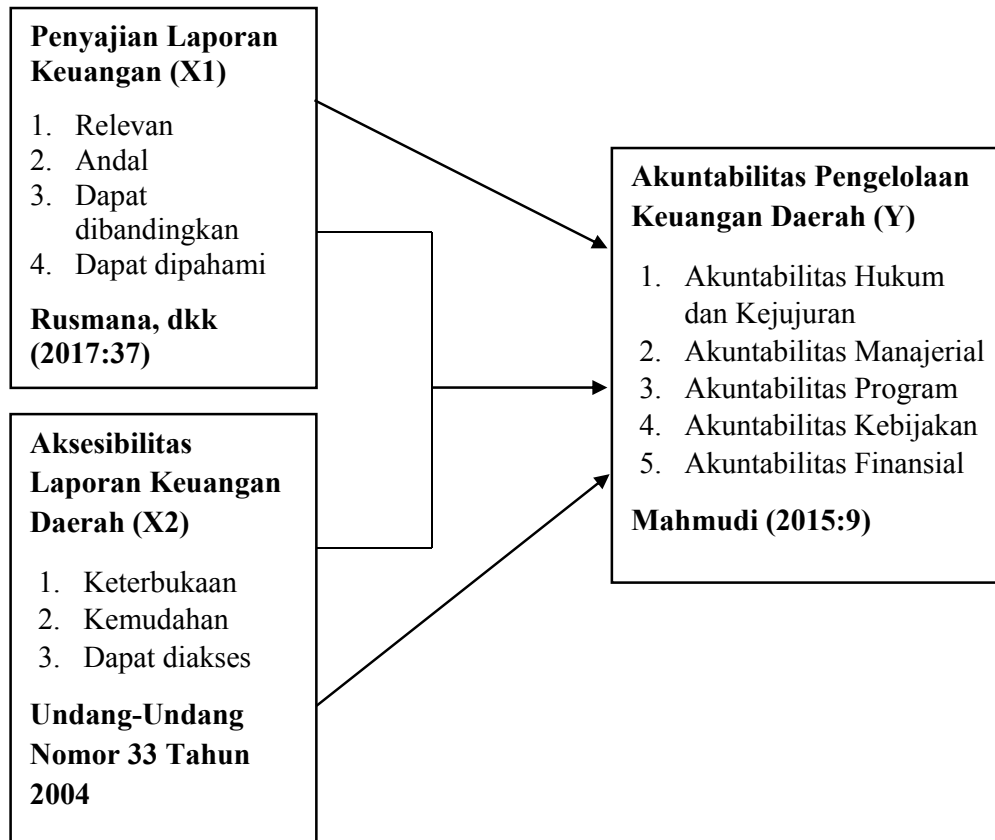
2.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah bukan hanya dilaporkan kepada lembaga perwakilan saja, masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan juga berhak atas akses terhadap laporan keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Maka berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah wajib untuk membuka selebar-lebarnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Akses yang diberikan kepada media massa baik media arus utama maupun media sosial adalah satu bentuk akuntabilitas keuangan daerah (Putri, 2017). Laporan keuangan yang mudah didapatkan oleh pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Menurut Kurniawan dan Rahayu (2019) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami akan berbanding lurus dengan akuntabilitas yang efektif.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat optimal apabila hanya penyajian laporan keuangan saja yang menjadi prioritas pemerintah. Penyajian laporan keuangan yang sudah baik akan menjadi percuma apabila laporan keuangan tersebut tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Hasil penelitian Masyhur (2017), Nurlali (2016), Sari (2017), Lily (2015), dan Superdi (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa faktor kedua yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat meng gambarkannya dalam bagan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Namun, dari keseluruhan penelitian tidak semuanya menunjukkan variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Perbedaan mungkin terjadi karena adanya perbedaan lingkungan kerja dari setiap

organisasi pemerintah. Hasil dari masing-masing penelitian untuk adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

**Penelitian Terdahulu Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Dika Kurniawan dan Sri Rahayu (2019) <i>e-proceeding of management</i> Vol.6, No.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018)	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan serta menggunakan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	a. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018. b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018

				c. Variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018
2.	Manur Sitinjak, Yundi Hafizrianda, Meinarni Asnawi (2019) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.4, No.1	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan variabel independen aksesibilitas laporan keuangan daerah dan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

3.	Salomi J. Hehanussa (2015) <i>Conference in Business, Accounting, and Management</i> Vol.2, No.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	a. Variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Firstcilia Eldy Putri (2017) JOM Fekon Vol. 4, No. 1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan	a. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	daerah serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5.	Hafzan Fikrian (2017) JOM Fekon Vol. 4, No. 1	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)	Persamaan : Menggunakan variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	a. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mirza Masyhur (2017) JOM Fekon Vol.4, No.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	a. Variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Nurlali (2016) JOM Fekon Vol.3, No.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dan variabel	a. Variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan

		Kabupaten Bengkalis)	dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Embun Widya Sari (2017) JOM Fekon Vol. 4, No. 1	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	a. Variabel penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. b. Variabel aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu

4.	Lily (2015) JOM Fekon Vol. 2, No. 2	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)	Persamaan : Menggunakan variabel independen aksesibilitas laporan keuangan serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan : Tidak menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5.	Superdi (2017) JOM Fekon Vol. 4, No. 1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)	Persamaan : Menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah serta variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah Perbedaan :	a. Variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. b. Variabel aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (pada SKPD

			Tidak menggunakan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bandung	Kabupaten Sijunjung).
--	--	--	--	-----------------------

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Nuryaman dan Christina (2015) pengertian hipotesis adalah bentuk pernyataan yang dapat diuji berupa dugaan adanya hubungan logis antara dua variabel atau lebih variabel penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang memprediksi hubungan yang diperkirakan masuk akal antara dua variabel atau lebih dalam data empiris, di mana bentuk pernyataan sementara tersebut dapat diuji (Sekaran dan Bougie, 2017:94).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, penulis akan melakukan pengujian dengan hipotesis :

- H1 : Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H2 : Terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H3 : Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan pertama kali dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017:38) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan objek penyajian laporan keuangan sebagai (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai (X2), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan secara ilmiah guna mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah :

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan survei merupakan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan data kuantitatif yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. (Sekaran dan Bougie, 2017:111). Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Sedangkan metode analisis verifikatif merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap populasi atau sampel (Sugiyono, 2017:8). Metode verifikatif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang adanya pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian merupakan sesuatu yang dipelajari oleh peneliti sehingga informasi yang berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menentukan operasional variabel penelitian, terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab muncul, berubah, dan mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2017:39).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dan dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono 2017:39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel bebas adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah . Sedangkan variabel terikat adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penyajian laporan keuangan (X1)	Penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Rusmana (2017:37)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Interval

Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)	Kemampuan pemerintah daerah untuk membuka akses bagi pemangku kepentingan guna memperoleh serta mengetahui laporan keuangan sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004	1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. Dapat Diakses	Interval
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015:9)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas finansial	Interval

Skala pengukuran yang berbentuk semantic differensial akan menghasilkan data dalam bentuk data interval. Skala interval menurut Ghazali (2018:5) adalah skala berupa nilai (*rate*) sesuai dengan skala penilaian yang dibuat sama (konstan). Data interval merupakan data yang diperoleh dari skala pengukuran semantic differensial. Skala ini dipergunakan untuk mengukur sikap yang tersusun dalam satu garis kontinum (Sugiyono, 2017:97). Responden yang memberi penilaian pada angka 5 menggambarkan bahwa responden memiliki persepsi sangat positif atas

pernyataan. Sebaliknya apabila responden memberikan penilaian pada angka 1, itu berarti bahwa responden memiliki persepsi sangat negatif atas pernyataan.

3.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

“Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin daripada karakteristik tertentu sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya”. (Yusuf 2015:146). Sedangkan menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya sebagai sebuah wilayah umum yang berisi subjek maupun objek yang memiliki karakteristik tertentu

Populasi pada penelitian ini adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terdiri dari dua sekretariat, satu inspektorat, 19 dinas, lima badan, dan satu satuan polisi pamong praja.

Tabel 3.2

Populasi Penelitian

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektorat
4	Dinas Pendidikan

5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Kebakaran
17	Dinas Pertanian
18	Dinas Pangan dan Perikanan
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Dinas Lingkungan Hidup
22	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Pesandian

23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber : Dokumen Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (2019)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Sedangkan sampel menurut Yusuf (2015:150) adalah bagian terpilih dari populasi yang mewakili populasi tersebut. Sampel dipergunakan karena adanya keterbatasan peneliti untuk melakukan penelitian pada semua yang ada dalam populasi. Kesimpulan dari sampel akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2017:81).

Teknik *Sampling purposive* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling* merupakan teknik yang akan dipergunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017:85) *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel yang bergantung pada kriteria dan pertimbangan tertentu.

Kriteria anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kriteria tersebut dipilih karena

pegawai tersebut mempunyai kepentingan sebagai pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Bandung.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Responden
1	Sekretariat Daerah	2
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2
3	Inspektorat	2
4	Dinas Pendidikan	2
5	Dinas Kesehatan	2
6	Dinas Sosial	2
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2
10	Dinas Tenaga Kerja	2
11	Dinas Perhubungan	2
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2

15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2
16	Dinas Kebakaran	2
17	Dinas Pertanian	2
18	Dinas Pangan dan Perikanan	2
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
21	Dinas Lingkungan Hidup	2
22	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Pesandian	2
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2
Total		56

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data dapat diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung sebagai pihak pertama yang mencari informasi. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk memperoleh data pada penelitian ini.

a. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka merupakan proses memperoleh data mengenai masalah yang sedang diteliti melalui seperti jurnal, buku, dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Data utama dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari penelitian lapangan. Data primer tersebut diperoleh dari masing-masing skor indikator variabel penelitian dari kuesioner yang dibagikan kepada responden penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang dipergunakan untuk penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif dan disebarkan kepada responden tanpa melalui perantara. Sedangkan Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji

Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Linier Berganda serta uji Analisis Koefisien Determinasi.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:51) uji validitas digunakan untuk kevalidan suatu kuesioner. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur maka semakin tepat pula alat tersebut mengukur. Instrumen yang baik adalah ketepatan instrumen yang valid mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2017:124).

Pengujian koefisien dengan menggunakan metode pearson merupakan teknik yang peneliti gunakan pada penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Pernyataan tidak valid dengan total skor variabel

H_a : Pernyataan valid dengan total skor variabel

2. Menentukan kriteria uji

- a. Jika koefisien korelasi (r) bernilai (+) dan $> r_{tabel}$, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah

- b. Jika koefisien korelasi (r) bernilai (-) dan $< r_{tabel}$, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut tidak valid atau tidak sah

3. Menarik kesimpulan

Peneliti menggunakan rumus *pearson product moment* untuk mencari nilai koefisien. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum X1X1tot) - (\sum X1)(\sum X1tot)}{((n \sum xi^2 - (\sum xi)^2)(n \sum xt^2 - (\sum xt)^2))}$$

Keterangan :

r = korelasi *product moment*

$\sum Xi$ = Jumlah skor suatu item

$\sum Xtot$ = Jumlah total skor jawaban

$\sum xi^2$ = Jumlah kuadrat skor jawaban suatu item

$\sum xt^2$ = Jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum XiXtot$ = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor

Sedangkan untuk r_{tabel} didapat dari *degree of freedom* (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2017:124) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi sehingga berkali-kali menghasilkan data yang sama. Menurut Nunnally dalam Imam Ghazali (2018:46) suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Chronbach's alpha* lebih besar daripada 0,7. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah :

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Pertanyaan atau pernyataan tidak reliabel

H_a : Pertanyaan atau pernyataan reliabel

2. Menentukan kriteria uji
 - a. Jika *cronbach's alpha* $\geq 0,7$ maka H_0 ditolak
 - b. Jika *cronbach's alpha* $< 0,7$ maka H_0 diterima
3. Menarik kesimpulan

Adapun rumus yang dipakai dalam uji reliabilitas ini adalah:

$$r_1 = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(\frac{1 - \sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_1 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians butir

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi variabel dalam suatu model regresi. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) merupakan alat uji yang digunakan untuk mendeteksi kenormalan distribusi residual. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_a : Data tidak terdistribusi secara normal

2. Menentukan kriteria pengujian

- a. Apabila nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp, Sig. (2-tailed)*
 $\geq 0,05$ maka H_0 diterima atau menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp, Sig. (2-tailed)*
 $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal.

3. Menarik kesimpulan

3.5.2.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji tingkat korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi yang terbentuk. Model regresi yang baik harus terhindar dari korelasi di antara variabel bebas. Nilai *tolerance* dan lawannya serta *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas di dalam model regresi. (Ghozali, 2018:108).

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terjadi yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas menurut Ghozali (2018:107) adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang

homoskedastisitas. Model regresi disebut homoskedastisitas jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap. (Ghozali, 2018:137)

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan di mana apabila nilai signifikan $>0,05$ maka model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:144).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model regresi linier untuk penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X1 = Penyajian laporan keuangan

X2 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah

a = Konstanta

b₁,b₂ = Koefisien regresi

e = Error

3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel bebas. Kemampuan variabel-variabel bebas dalam

menjelaskan variasi variabel terikat terbatas apabila nilai R^2 kecil. Sedangkan nilai yang mendekati satu memiliki arti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2018:97).

Besarnya koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

R = Koefisien korelasi

3.5.5 Pengujian Hipotesis

3.5.5.1 Uji Statistika t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *level of significant* (α) 5% atau 0,05 karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan antar variabel atau menunjukkan bahwa korelasi antar variabel cukup nyata. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2018:99). Uji t yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Merumuskan hipotesis statistik

a. Untuk variabel penyajian laporan keuangan

$H_0 : \beta = 0$ Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

$H_a : \beta \neq 0$ Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah

$H_0 : \beta = 0$ Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$H_a : \beta \neq 0$ Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2. Kriteria pengambilan keputusan

a. H_0 diterima jika nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} .

b. H_0 ditolak jika nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} .

3. Menarik kesimpulan

Adapun rumus untuk menentukan t_{hitung} adalah :

$$t = \frac{\beta}{se\beta}$$

Keterangan:

β = Koefisien regresi (beta)

se = Standar error

Sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari :

$$Df = n - k$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

3.5.5.2 Uji Statistika F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *level of significant* (α) 5% atau 0,05 karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan variabel yang diuji atau menunjukkan bahwa korelasi variabel cukup nyata. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2018:98). Uji F yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta = 0$ Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

$H_a : \beta \neq 0$ Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Kriteria pengambilan keputusan

- a. H_0 diterima jika nilai F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel}
- b. H_0 ditolak jika nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} .

3. Menarik kesimpulan

Adapun rumus untuk menentukan F_{hitung} adalah :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi gabungan

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Nilai F_{tabel} diperoleh dari :

$$Df = n - k - 1$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Penelitian ini merupakan deskripsi mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan rumus tersebut didapatkan bahwa sampel pada penelitian ini adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan penentuan sample menggunakan metode *purposive sampling* sehingga responden merupakan orang yang telah ditentukan sebelumnya. Responden pada penelitian ini merupakan pegawai yang bekerja pada bagian keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

4.1.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.1.1.1 Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini r_{tabel} ditetapkan sebesar 0,266. Penetapan r_{tabel} berdasarkan $df=54$ yang didapatkan dari $56-2=54$ dengan rumus $n-2$. Adapun ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

Berikut merupakan tabel rekapitulasi hasil uji validitas variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,635	0,266	Valid
2	0,644	0,266	Valid
3	0,682	0,266	Valid
4	0,718	0,266	Valid
5	0,782	0,266	Valid
6	0,716	0,266	Valid
7	0,585	0,266	Valid
8	0,787	0,266	Valid
9	0,739	0,266	Valid
10	0,761	0,266	Valid

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid untuk mengukur variabel penyajian laporan keuangan karena seluruh r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} (0,266).

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,896	0,266	Valid
2	0,655	0,266	Valid
3	0,863	0,266	Valid

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 4.2 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid untuk mengukur variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah karena seluruh r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} (0,266).

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
1	0,684	0,266	Valid
2	0,698	0,266	Valid
3	0,635	0,266	Valid
4	0,685	0,266	Valid
5	0,622	0,266	Valid
6	0,593	0,266	Valid
7	0,724	0,266	Valid

8	0,684	0,266	Valid
9	0,797	0,266	Valid
10	0,753	0,266	Valid
11	0,643	0,266	Valid

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid untuk mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena seluruh r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} (0,266).

4.1.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan secara statistik dengan cara menghitung *Cronbach Alpha*. Ketentuan untuk pengambilan keputusan adalah jika nilai hitung *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,882	,888	10

Sumber : Data Diolah (2019)

Pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,888. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,70 yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel penyajian laporan keuangan.

Tabel 4.5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,739	,734	3

Sumber: Data Diolah (2019)

Pada tabel 4.5 dapat disimpulkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,734. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,70 yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,884	,886	11

Sumber : Data Diolah (2019)

Pada tabel 4.6 dapat disimpulkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,886. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,70 yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7**Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov***

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,69389773
	Most Extreme Absolute Differences	,075
	Positive	,075
	Negative	-,057
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai *Test Statistic Kolmogorov Smirnov* adalah 0,075 dengan signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dan *Tolerance*. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah apabila nilai $Tolerance \geq 0.10$ atau nilai $VIF \leq 10$ maka data tidak terjadi multikolineritas (Ghozali, 2018:108).

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penyajian Laporan Keuangan	,756	1,322
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	,756	1,322

Sumber : Data Diolah (2019)

Tabel 4.8 memberikan informasi bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel independen yang berada pada nilai 0,756 di mana nilai tersebut merupakan nilai yang lebih besar daripada 0,10 dan *VIF* dari masing-masing variabel independen yang berada pada nilai 1,322 di mana nilai tersebut merupakan nilai yang lebih kecil daripada 10.

4.1.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode glejser untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018:137). Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Varibel Independen	Sig.	Keputusan
Penyajian Laporan Keuangan	0,444	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,367	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas Glejser pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikan pada tabel di atas tingkat kepercayaan 0,05 (5%).

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi responden sehingga memudahkan dalam menganalisis serta memahami objek dan subjek penelitian. Data responden yang berhasil dikumpulkan dari penyebaran kuesioner adalah sebanyak 56 responden. Responden merupakan pegawai bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Data mengenai responden adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Frekuensi	%
1	Sekretariat Daerah	2	3,57%
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	3,57%
3	Inspektorat	2	3,57%
4	Dinas Pendidikan	2	3,57%
5	Dinas Kesehatan	2	3,57%
6	Dinas Sosial	2	3,57%
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2	3,57%
8	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	2	3,57%
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	3,57%
10	Dinas Tenaga Kerja	2	3,57%
11	Dinas Perhubungan	2	3,57%
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3,57%
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2	3,57%
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	3,57%

15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2	3,57%
16	Dinas Kebakaran	2	3,57%
17	Dinas Pertanian	2	3,57%
18	Dinas Pangan dan Perikanan	2	3,57%
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	3,57%
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3,57%
21	Dinas Lingkungan Hidup	2	3,57%
22	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Pesandian	2	3,57%
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	3,57%
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	3,57%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3,57%
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	3,57%
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3,57%
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3,57%
Jumlah		56	99,96%$\approx$100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

4.1.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

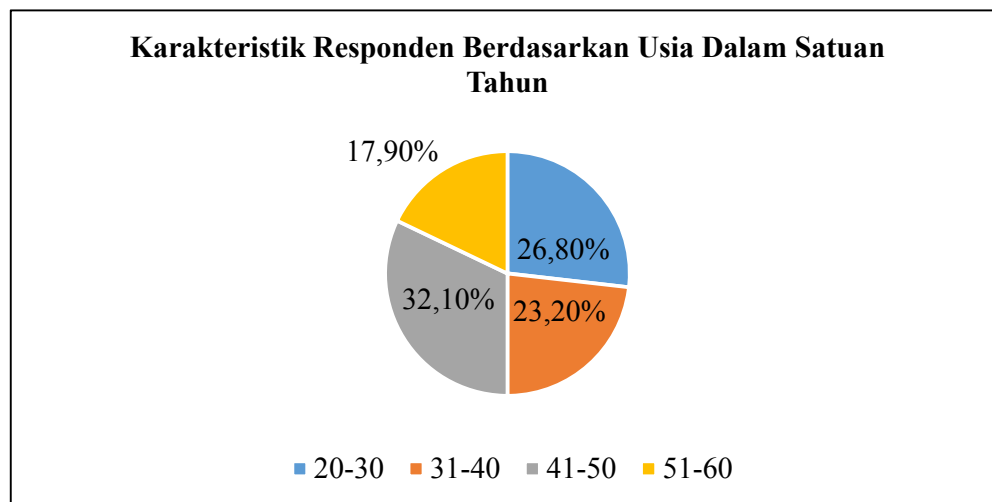
Tabel 4.11

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	%
20-30	15	26,8%
31-40	13	23,2%
41-50	18	32,1%
51-60	10	17,9%
Jumlah	56	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 18 orang. Sedangkan responden yang berusia pada rentang 51-60 tahun merupakan responden dengan jumlah paling sedikit yaitu 10 orang. Rekapitulasi karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Usia

Sumber : Data Diolah (2019)

4.1.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

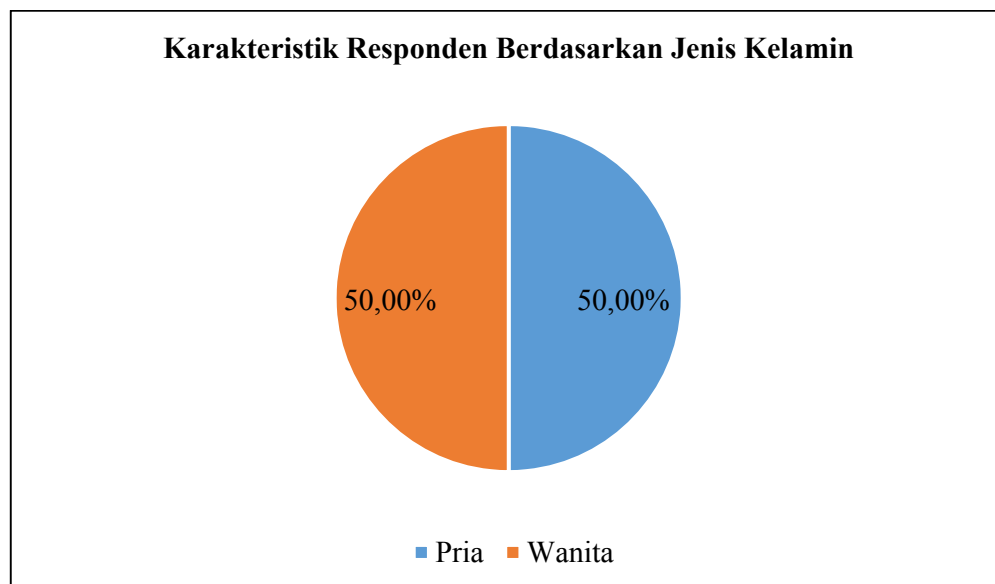
Tabel 4.12

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Pria	28	50%
Wanita	28	50%
Jumlah	56	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini melibatkan pria dan wanita dengan jumlah sama banyak yaitu masing-masing 28 orang. Rekapitulasi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Diolah (2019)

4.1.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

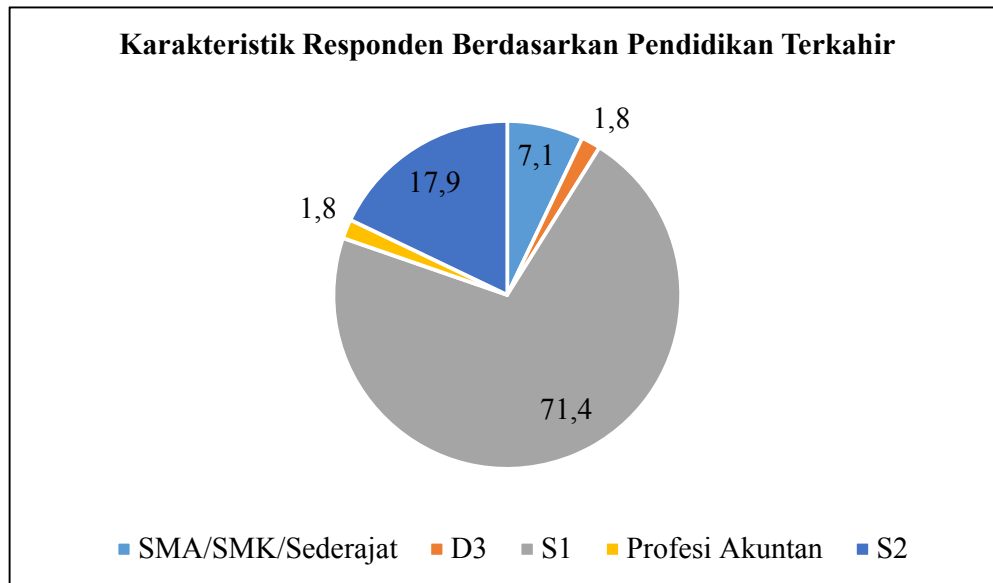
Tabel 4.13

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
SMA/SMK/Sederajat	4	7,1%
Diploma 3(D3)	1	1,8%
Strata 1 (S1)	40	71,4%
Profesi Akuntan	1	1,8%
Strata 2 (S2)	10	17,9%
Jumlah	56	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir Strata 1 (S1) dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Sedangkan responden yang berpendidikan terakhir Diploma 3 (D3) dan Profesi Akuntan merupakan responden dengan jumlah paling sedikit yaitu masing-masing 1 orang. Rekapitulasi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : Data Diolah (2019)

4.1.3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

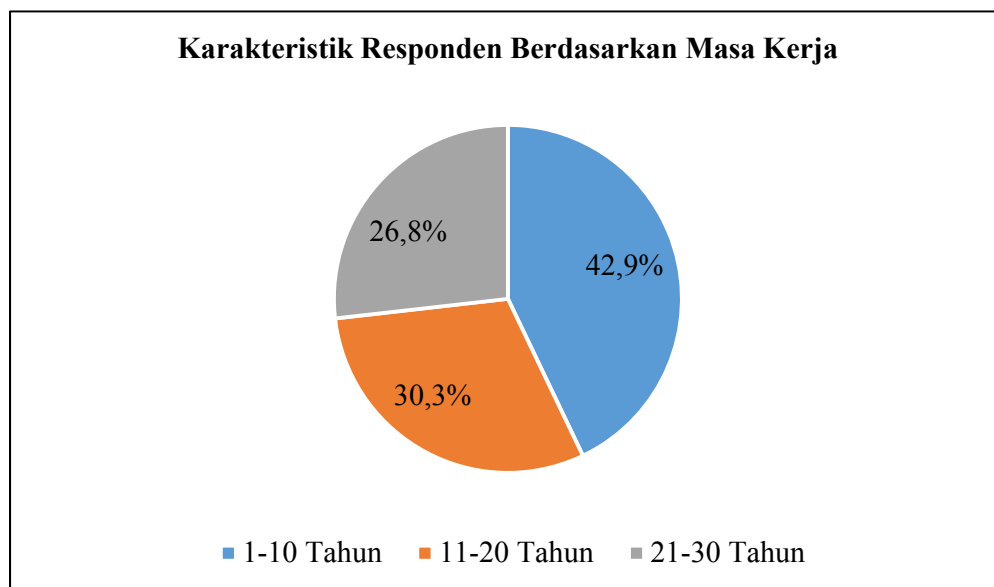
Tabel 4.14

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	%
1-10 Tahun	24	42,9%
11-20 Tahun	17	30,3%
21-30 Tahun	15	26,8%
Jumlah	56	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja pada rentang 1-10 tahun dengan jumlah responden sebanyak 24 orang. Sedangkan responden yang memiliki masa kerja pada rentang 21-30 tahun merupakan responden dengan jumlah paling sedikit yaitu 15 orang. Rekapitulasi karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Masa Kerja

Sumber : Data Diolah (2019)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

4.2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Penyajian laporan keuangan diukur dengan 10 item pernyataan yang terdiri dari indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Indikator relevan diukur dengan item pernyataan nomor 1 sampai dengan 4, indikator andal diukur dengan item pernyataan nomor 5 sampai dengan 7, indikator dapat dibandingkan diukur dengan item pernyataan nomor 8 dan 9. Sedangkan item pernyataan nomor 10 digunakan untuk mengukur indikator dapat dipahami.

Penilaian responden mengenai penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	5	4	3	2	1		
1	20	33	3	0	0	56	241
2	28	24	4	0	0	56	248
3	29	25	2	0	0	56	251
4	32	23	1	0	0	56	255
5	37	19	0	0	0	56	261
6	34	22	0	0	0	56	258

7	26	27	1	2	0	56	245
8	33	20	3	0	0	56	254
9	31	24	1	0	0	56	254
10	23	26	7	0	0	56	240
Total skor dicapai							2.507

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2019)

Pengategorian sebagai berikut dilakukan untuk memberikan interpretasi dari skor yang diperoleh.

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n

$$= 5 \times 10 \times 56$$

$$= 2.800$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pernyataan x n

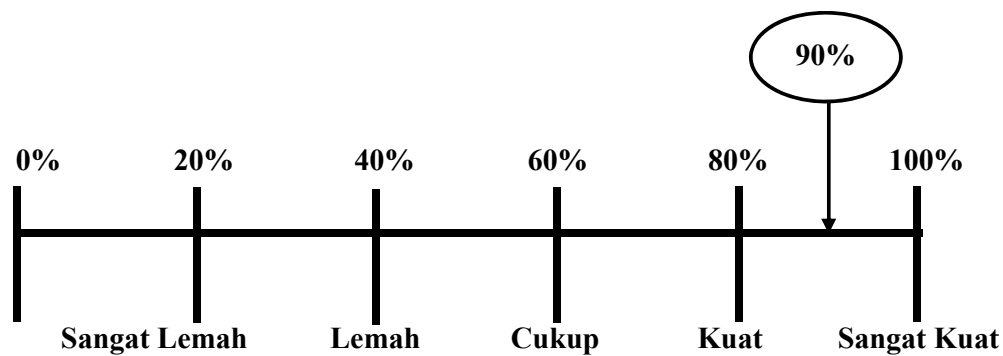
$$= 1 \times 10 \times 56$$

$$= 560$$

Presentase skor = (skor aktual : skor ideal) x 100%

$$= (2507:2800) \times 100\%$$

$$= 89,54 \% \approx 90\%$$



Dapat dilihat pada uraian di atas, responden memberikan skor sebesar 2.507 dari skor ideal 2.800 sehingga presentase dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal adalah sebesar 90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sudah baik.

4.2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Aksesibilitas laporan keuangan daerah diukur dengan tiga indikator yang dituangkan dalam tiga pertanyaan. Indikator tersebut adalah keterbukaan, kemudahan, dan dapat diakses. Indikator keterbukaan diukur dengan item pernyataan nomor 11, indikator kemudahan diukur dengan item pernyataan nomor 12, dan indikator dapat diakses diukur dengan item pernyataan nomor 13. Berikut merupakan rekapitulasi penilaian yang diberikan oleh responden mengenai aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 4.16

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	5	4	3	2	1		
11	6	20	22	7	1	56	191
12	18	29	9	0	0	56	233
13	10	26	13	5	2	56	205
Total skor dicapai							629

Sumber : Kuesioner Penelitian (2019)

Pengkategorian sebagai berikut dilakukan untuk memberikan Interpretasi dari skor yang diperoleh.

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n

$$= 5 \times 3 \times 56$$

$$= 840$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pernyataan x n

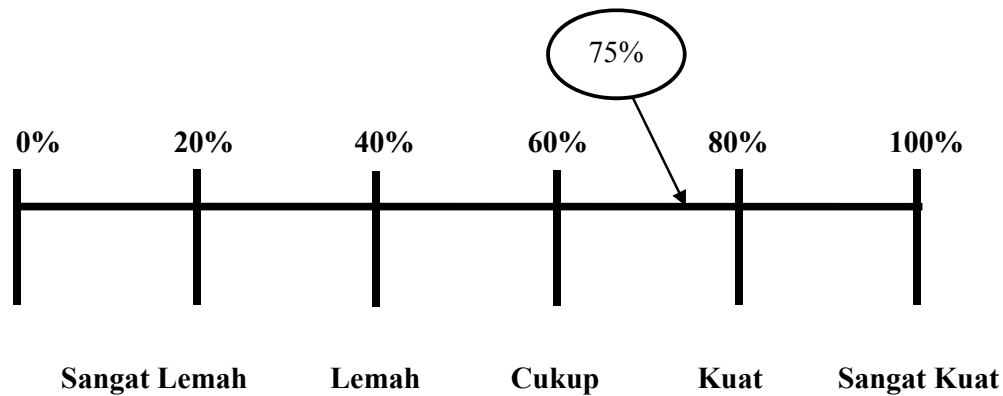
$$= 1 \times 3 \times 56$$

$$= 168$$

Presentase skor = (skor aktual : skor ideal) x 100%

$$= (629:840) \times 100\%$$

$$= 74,88 \approx 75\%$$



Dapat dilihat pada uraian di atas, responden memberikan skor sebesar 629 dari skor ideal 840 sehingga presentase dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal adalah sebesar 75%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sudah baik.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan 11 pernyataan yang memenuhi lima indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran diukur dengan item pernyataan nomor 14 dan 15, indikator akuntabilitas manajerial diukur dengan item pernyataan nomor 16 sampai dengan 18, indikator akuntabilitas program diukur dengan item pernyataan nomor 19 dan 20, akuntabilitas kebijakan diukur dengan item pernyataan 21 dan 22. Sedangkan item pernyataan nomor 23 dan 24 digunakan untuk mengukur indikator akuntabilitas finansial. Berikut merupakan rekapitulasi penilaian yang diberikan

oleh responden mengenai aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 4.17

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah**

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	5	4	3	2	1		
14	39	15	2	0	0	56	261
15	39	17	0	0	0	56	263
16	21	34	1	0	0	56	244
17	17	36	3	0	0	56	238
18	17	34	5	0	0	56	236
19	13	32	11	0	0	56	226
20	33	21	2	0	0	56	255
21	34	20	2	0	0	56	256
22	27	24	3	2	0	56	244
23	33	20	1	2	0	56	252
24	36	19	1	0	0	56	259
Total skor dicapai							2.734

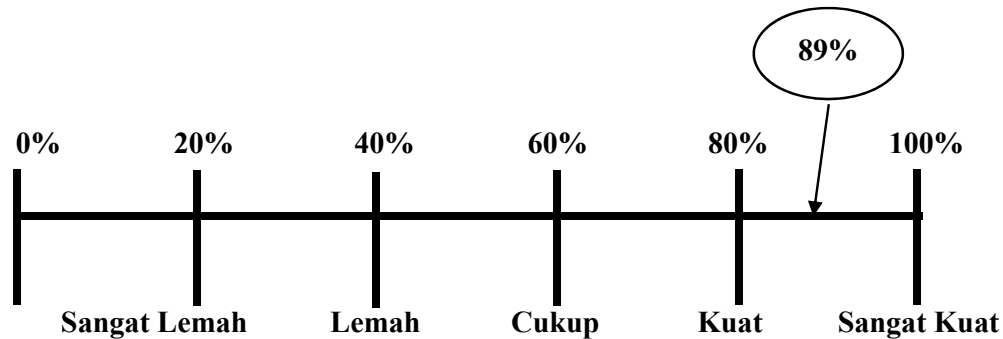
Sumber : Kuesioner Penelitian (2019)

Pengkategorian sebagai berikut dilakukan untuk memberikan Interpretasi dari skor yang diperoleh.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks skor maksimum} &= \text{bobot tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \times n \\
 &= 5 \times 11 \times 56 \\
 &= 3.080
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks skor minimum} &= \text{bobot terendah} \times \text{jumlah pernyataan} \times n \\
 &= 1 \times 11 \times 56 \\
 &= 616
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase skor} &= (\text{skor aktual} : \text{Skor ideal}) \times 100\% \\
 &= (2.734 : 3.080) \times 100\% \\
 &= 88,77\% \approx 89\%
 \end{aligned}$$



Dapat dilihat pada uraian di atas, responden memberikan skor sebesar 2.734 dari skor ideal 3.080 sehingga presentase dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal adalah sebesar 89%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sudah baik.

4.2.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda karena model ini digunakan untuk menganalisis lebih dari suatu variabel. Berikut adalah persamaan regresi berganda tersebut.

Tabel 4.18
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,363	4,091		2,778	,008
PLK	,728	,105	,667	6,958	,000
ALKD	,436	,196	,213	2,221	,031

Sumber : Data Diolah (2019)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linear berganda antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar 11,363 dengan nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,728, (b2) sebesar 0,436 dan standar error (e) sebesar 4,091. Sehingga persamaan regresi linear yang terbentuk dari hasil estimasi di atas adalah sebagai berikut :

$$Y=11,363 + 0,728X_1 + 0,436X_2 + 4,091$$

Nilai koefisien regresi pada persamaan regresi linear di atas memiliki tanda positif. Tanda positif tersebut menandakan bahwa adanya hubungan yang

berbanding lurus antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik maka akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya apabila penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak baik maka akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik pula. Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$a = 11,363$ konstanta sebesar 11,363 menunjukkan bahwa variabel bebas jika diasumsikan konstan maka variabel terikat adalah sebesar 11,363 satuan.

$B_1 = 0,728$ koefisien variabel penyajian laporan keuangan (X_1) bernilai positif sebesar 0,728 yang memiliki arti setiap kenaikan penyajian laporan keuangan sebesar satu satuan maka pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah naik sebesar 0,728 satuan.

$B_2 = 0,436$ koefisien variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2) bernilai positif sebesar 0,436 yang memiliki arti setiap kenaikan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar satu satuan maka pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah naik sebesar 0,436 satuan.

4.2.3.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai dalam bentuk persentase yang menunjukkan besaran kontribusi pengaruh yang diberikan oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.19

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,794 ^a	,631	,617	2,74426

Sumber : Data Diolah (2019)

Tabel koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,617 atau dalam bentuk persentase menjadi 61,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh yang diberikan oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 61,7% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan nilai sebesar 38,3% yang diperoleh dari 1-*R square* merupakan besaran kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain di luar dari faktor yang diteliti.

4.2.3.3 Pengujian Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu dalam menerangkan variance variabel terikat (Ghozali, 2018:99). Rumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

a. Untuk variabel penyajian laporan keuangan

$H_0 : \beta = 0$ Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

$H_a : \beta \neq 0$ Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah

$H_0 : \beta = 0$ Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$H_a : \beta \neq 0$ Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah :

a. H_0 diterima jika nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} .

b. H_0 ditolak jika nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} .

Penelitian ini menetapkan t_{tabel} sebesar 2,00575 dengan rumus untuk Df adalah $56-3$ sehingga didapatkan Df sebesar 53. Berikut merupakan tabel hasil uji t yang digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan.

Tabel 4.20**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,363	4,091		2,778	,008
PLK	,728	,105	,667	6,958	,000
ALKD	,436	,196	,213	2,221	,031

Sumber : Data Diolah (2019)

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel penyajian laporan keuangan adalah 6,958. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang memiliki nilai 2,00575. Berdasarkan informasi yang tersaji yaitu nilai $6,958 > 2,00575$. Maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan nilai t_{hitung} variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah 2,221. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang memiliki nilai 2,00575 maka dapat disimpulkan bahwa bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena $2,221 > 2,00575$.

4.2.3.4 Pengujian Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan (Ghozali,2018:98). Hipotesis statistik untuk uji F adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$H_a : \beta \neq 0$ Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- H_0 diterima jika nilai F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel}
- H_0 ditolak jika nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} .

Penelitian ini menetapkan F_{tabel} sebesar 2,78 dengan rumus untuk Df adalah $56-2-1$ sehingga didapatkan Df sebesar 53. Berikut merupakan tabel hasil uji F yang digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan

Tabel 4.21
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	683,075	2	341,537	45,351	,000 ^b
Residual	399,140	53	7,531		
Total	1082,214	55			

Sumber : Data Diolah (2019)

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 45,351. Hal tersebut menggambarkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai 45,351 yang lebih besar dari F_{tabel} yang memiliki nilai 2,78. Sesuai dengan kriteria hipotesis maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

4.3.1.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan responden yang telah dilakukan terhadap variabel penyajian laporan keuangan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung terdapat pada kategori sangat kuat berdasarkan garis kontinum dengan persentase sebesar 90%. Hal tersebut dibuktikan dengan tanggapan responden yang didominasi oleh skor 5, di mana skor tersebut merupakan interpretasi dari sangat sesuai pernyataan dengan sikap responden. Umumnya item pernyataan secara keseluruhan memperoleh tanggapan yang diinterpretasikan baik yaitu skor 4 dan skor 5.

Rekapitulasi skor tanggapan responden menunjukkan bahwa indikator relevan umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 berjumlah 10 responden, dari 10 responden tersebut tiga responden merupakan responden yang menanggapi item pernyataan nomor 1, empat responden menanggapi item pernyataan nomor 2, dua responden menanggapi item pernyataan nomor 3, dan satu responden menanggapi item pernyataan nomor 4. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih ada kelemahan penyajian laporan keuangan pada indikator relevan. Hal tersebut perlu ditingkatkan karena informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan maksud dan kepentingan para pengguna laporan keuangan.

Indikator andal umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 dan skor 2 masing-masing berjumlah satu responden dan dua responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 7. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih ada kelemahan penyajian laporan keuangan pada indikator andal. Hal tersebut perlu ditingkatkan karena keandalan laporan keuangan terutama netralitas merupakan hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan tidak memihak kepada sebagian pengguna laporan keuangan.

Indikator dapat dibandingkan mendapat tanggapan yang umumnya positif, tetapi masih terdapat empat responden yang menganggapi dengan skor 3. Empat responden tersesebut terbagi dalam dua item pernyataan, tiga responden dalam item pernyataan nomor 8 dan satu responden dalam item pernyataan nomor 9. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan penyajian laporan keuangan pada indikator dapat dibandingkan. Penyajian laporan keuangan yang dapat dibandingkan perlu mendapat perhatian dari pengelola keuangan daerah agar dapat ditingkatkan karena laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan secara konsisten diimplementasikan setiap tahun.

Indikator dapat dipahami secara umum mendapat tanggapan positif dari para responden, tetapi terdapat tujuh responden yang memberikan tanggapan dengan skor 3. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masih ada kelemahan pada indikator mudah dipahami pada laporan keuangan. Indikator tersebut merupakan hal penting dalam menyampaikan informasi dari pengguna keuangan

daerah kepada para pemangku kepentingan sehingga para pemangku kepentingan terutama masyarakat dapat menerjemahkan informasi dengan mudah dan tepat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden maka dapat dilihat bahwa item pertanyaan nomor 7 terdapat 2 responden yang memberikan skor 2, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kelemahan pada indikator andal yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung masih belum sepenuhnya memuat informasi yang berlaku umum sehingga belum dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

4.3.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Hasil rekapitulasi skor tanggapan responden yang telah dilakukan terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung terdapat pada kategori kuat berdasarkan garis kontinum dengan persentase sebesar 75%. Hal tersebut dibuktikan dengan tanggapan responden yang didominasi oleh skor 4, di mana skor tersebut merupakan interpretasi dari sesuainya pernyataan dengan sikap responden.

Indikator keterbukaan didominasi oleh tanggapan responden yang memberikan skor 3 dengan jumlah 22 responden, hanya ada enam responden yang menanggapi dengan skor 5 dan 20 responden yang menanggapi dengan skor 4. Responden yang memberi tanggapan pada skor 2 dengan jumlah tujuh responden justru lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memberi tanggapan pada skor 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada

keterbukaan laporan keuangan daerah. Keterbukaan laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena para pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui laporan keuangan daerah.

Kemudahan untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan dapat diinterpretasikan sudah baik. Namun pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemudahan bagi para pemangku kepentingan agar akuntabilitas juga dapat meningkat. Hal tersebut terlihat pada tanggapan responden yang dominan memberi skor 4, tetapi masih ada 9 responden yang memberi tanggapan pada skor 3.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator dapat diaksesnya laporan keuangan daerah. Maka interpretasinya adalah laporan keuangan daerah dapat diakses melalui situs web, tetapi perlu adanya peningkatan karena masih terdapat 5 responden yang masih memberikan skor 2 dan 2 responden yang memberikan skor 1.

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden maka dapat dilihat bahwa item pertanyaan nomor 11 dan 13 masih mendapatkan skor 1 dan 2. Item pertanyaan nomor 11 sebanyak tujuh responden masih memberikan skor 2 dan satu responden memberikan skor 1, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung masih belum sepenuhnya dipublikasikan secara terbuka melalui media massa. Sedangkan untuk item pertanyaan nomor 13 sebanyak 5 responden memberikan skor 2 dan 2 responden memberikan skor 1, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung masih belum sepenuhnya dapat diakses melalui situs web.

4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan responden yang telah dilakukan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung terdapat pada kategori sangat kuat berdasarkan garis kontinum dengan persentase sebesar 89%. Hal tersebut dibuktikan dengan tanggapan responden yang didominasi oleh skor 5, di mana skor tersebut merupakan interpretasi dari sangat sesuai pernyataan dengan sikap responden. Umumnya item pernyataan secara keseluruhan memperoleh tanggapan yang diinterpretasikan baik yaitu skor 4 dan skor 5.

Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 berjumlah dua responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 14. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas hukum dan kebijakan. Maka hal tersebut perlu ditingkatkan karena indikator akuntabilitas tersebut berhubungan dengan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator akuntabilitas manajerial umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 berjumlah 9 responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 16,17,dan 18

dengan rincian item pernyataan nomor 16 sebanyak satu responden, item pernyataan nomor 17 sebanyak tiga responden, dan item pernyataan nomor 18 sebanyak lima responden. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas manajerial. Maka hal tersebut perlu ditingkatkan karena indikator akuntabilitas tersebut berhubungan dengan tingkat efektif dan efisien pengelolaan lembaga pemerintah.

Indikator akuntabilitas program umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 berjumlah 13 responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 19 dan 20 dengan rincian item pernyataan nomor 19 sebanyak 11 responden dan item pernyataan nomor 20 sebanyak dua responden. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas program. Maka hal tersebut perlu ditingkatkan karena indikator akuntabilitas tersebut berhubungan dengan seberapa optimal hasil yang didapatkan dari program dan seberapa rendah biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah.

Indikator akuntabilitas kebijakan umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 berjumlah lima responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 21 dan 22 dengan rincian item pernyataan nomor 21 sebanyak dua responden dan item pernyataan nomor 22 sebanyak tiga responden. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

masih terdapat kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas kebijakan. Maka hal tersebut perlu ditingkatkan karena indikator akuntabilitas tersebut berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah

Indikator akuntabilitas finansial umumnya mendapatkan jumlah tanggapan positif yang relatif lebih banyak. Responden yang memberikan tanggapan skor 3 hanya berjumlah 2 responden, responden yang memberikan tanggapan tersebut adalah responden yang menanggapi item pernyataan nomor 23 dan 24 dengan banyaknya responden masing-masing satu responden. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas finansial. Maka hal tersebut perlu ditingkatkan karena indikator akuntabilitas tersebut berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah mengingat publik selalu mempunyai perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Rekapitulasi tanggapan responden menunjukkan bahwa pada item pertanyaan nomor 22 dan 23 masih terdapat dua responden yang memberikan skor 2, hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kelemahan mengenai pengkomunikasian kebijakan kepada bawahan serta belum maksimalnya pelaksanaan *financial audit* laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

4.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

4.3.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan tersebut diperoleh dari bukti bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} , dengan demikian H_1 yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Aktivitas pengelolaan sumber daya daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, dimana keterbukaan tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas (Masyhur, 2017). Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah daerah sudah berhasil mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban aktivitas pemerintah daerah sebagai pemegang amanat rakyat untuk mengelola keuangan rakyat serta bagaimana penggunaan keuangan daerah. Selain itu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan dapat menjadi media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat karena terdapat indikator mudah dipahami di mana indikator tersebut mengharuskan laporan keuangan sedapat mungkin mudah

dipahami oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan yang baik akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan dan Rahayu (2019), Asnawi, dkk (2019), Hehanussa (2015), Putri (2017), Fikrian (2017) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah diuraikan menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan tersebut diperoleh dari bukti bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} , dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Menurut Kurniawan dan Rahayu (2019) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Akses publik terhadap laporan keuangan akan berbanding lurus dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena laporan keuangan dapat menjadi bahan untuk menilai kinerja pemerintah. Maka dari itu laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya dilaporkan kepada lembaga perwakilan rakyat tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat

sebagai salah satu pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masyhur (2017), Nurlali (2016), Sari (2017), Lily (2015), dan Superdi (2017) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil uji F yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan tersebut diperoleh dari bukti bahwa variabel bebas memiliki F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} , dengan demikian H_3 yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu misi utama dari otonomi daerah adalah menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan salah satunya dengan mengawasi kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan misi utama tersebut maka pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan dengan bentuk antara lain penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Selain itu pemerintah daerah perlu terbuka serta memberikan akses seluas mungkin kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang berhasil mempertanggungjawabkan penyajian laporan keuangan serta aksesibilitas laporan keuangan daerahnya dikatakan telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah sehingga misi dari otonomi daerah dapat terwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurlaili (2016), Kurniawan dan Rahayu (2019), dan Hehanussa (2015) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori sangat kuat pada garis kontinum. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sudah baik. Namun, masih perlu peningkatan terutama pada keandalan laporan keuangan. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sudah baik, tetapi masih perlu peningkatan terutama pada keterbukaan serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk laporan keuangan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori sangat kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung sudah baik. Namun, masih perlu peningkatan pada akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

3. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan sebaiknya ditingkatkan terutama pada indikator keandalan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memuat informasi pada laporan keuangan yang berlaku umum dan tidak memihak hanya kepada salah satu pemangku kepentingan. Selain itu, keterbukaan serta laporan keuangan daerah yang dapat diakses hendaknya ditingkatkan dengan cara membuka laporan keuangan daerah melalui website ataupun media massa baik media massa arus utama seperti televisi dan koran maupun media sosial.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebaiknya ditingkatkan khususnya pada akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi mengenai kebijakan kepada bawahan serta meningkatkan pelaksanaan *financial audit* laporan keuangan.
3. Meningkatkan penyajian laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ikut meningkat.
4. Meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ikut meningkat.
5. Meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S. Nahar, A. (2012), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8 No.2, hlm.137-150.
- Asnawi, M. Hafizrianda, Y. Sitinjak, M. (2019), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.4 No.1, hlm. 44-60.
- Dokumen Nama OPD Kabupaten Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2019
- Elsye, R. Suwanda, D. Muchidin, U. (2016), *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erlina. Rambe, O.S. Rasdianto. (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fikrian, H. (2017), Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, hlm. 483-497.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*, Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Hehanussa, S.J. (2015), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon, *Conference In Business, Accounting, and Management*, Vol.2 No.1, hlm. 82-90.
- <https://www.ayobandung.com/read/2019/05/28/53656/pemkab-bandung-raih-hattrick-opini-wtp>, diunduh 5 Oktober 2019.
- <https://www.bandungkab.go.id>, diakses 5 Oktober 2019.
- <https://www.bandungkab.go.id/arsip/kinerja-2017-pemkab-bandung-tingkatkan-penilaian-sakip>, diunduh 4 November 2019.
- <https://www.jabar.tribunnews.com/2019/01/28/provinsi-jabar-dan-kota-bandung-raih-nilai-a-dalam-rapor-dari-kementerian-panrb>, diunduh 5 Oktober 2019.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/06/20/tiga-pemda-masih-wdp-pemprov-jabar-ambil-langkah-strategis>, diunduh 5 Oktober 2019.

- Kurniawan, D. dan Rahayu, S. (2019), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018), *e-proceeding of management*, Vol.6 No.1, hlm 705-714.
- LAN. (2010), *Manajemen Pelayanan Inklusif (Sebuah Gambaran Singkat dan Langkah Pengukuran)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lily. (2015), Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh), *JOM Fekon*, Vol. 2 No.2, hlm. 1-15.
- Lukito, P.K. (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2006), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2 No.1, hlm. 1-17.
- Masyhur, M. (2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai, *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, hlm. 1179-1192.
- Nunnally, J. (1967), *Psychometric Methods*, New York: McGraw-Hill.
- Nurlaili. (2016), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis), *JOM Fekon*, Vol.3 No.1, hlm.449-461.
- Nuryaman. dan Christina, Veronica. (2015), *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

- Putri, F.E. (2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, hlm. 483-498.
- Rusmana, O. Setyaningrum, D. Yuliansyah. dan Maryani. (2017), *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, E.W. (2017), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hulu, *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, hlm. 571-586.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Somad, A. (2016), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang), *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol.4 No.2, hlm.1-20.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Superdi. (2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung), *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, hlm. 2015-2029.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yusuf, A.M. (2015), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.